

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin, & Zainal A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). Beberapa Catatan Lembaga-Lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural, Kantor Menpan RI.
- Asshiddiqie, J. (2013). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.
- Asshiddiqie, J. (2014). Perihal Undang-Undang, Cetakan Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Edisi ke-1). Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Enny Nurbaningsih, (2019). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah. Depok: Rajawali Pers.
- Farida, Maria. (2002). Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary* (Edisi Kedelapan). St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Hamid, Hendrawati. (2020). Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Garis Khatulistiwa.

- Hamidi, Jazim & Mutik, Kemilau. (2011). *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Total Media.
- Hasyimzoeen & Yusnani. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR. Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juniaro, Ridwan & Acmad, Sudrajat. (2012). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Philippus. M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*, Jurnal Ilmiah Yuridika Universitas Airlangga.
- Ria Casmi Arrsa, dkk. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point of Legal Paradigm on Sustainable Development)*, UB Press, Malang.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Triyono, Rachmat. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo Ekathahjana, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008)

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

c. Artikel Jurnal

Agustin Aritonang, R. (2023). “Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma”. *Hangoluan Law Review*, 2, 46–72.

Anggraeni, R. (2015). Produk Hukum Daerah: Apa Dan Bagaimana Seharusnya. *Info Hukum*, 2(25), 2–5.

Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, 2(1), 153.
<https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3392>

Arzia Isma, Ivo, Nelson Simanjuntak, & John Pieris. (2023). “Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi Dalam Indeks Kebutuhan Peraturan Daerah.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*

Barlian, A. E. A. (2016). “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum”. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 10(4).: 605-622.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>

Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.

- Dirga, A., Hidayat, A., & Rahmatiah, H. (2022). Penerapan Prinsip *Check and Balances* dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam. *Siyasatuna*. 3(1), 40–51. Retrieved from <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22902>
- Djumara, N. (n.d.). Dimensi-Dimensi Pokok Check and Balances Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- Febriani, Ayu, and Muthiara Wasti. (2023). “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (91). Hlm 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Ghoni, C. A. (2021). Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk Di Daerah oleh Kemenkumham. *Jurist-Diction*, 4(1), 69–92. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24293>
- Hartono, Bambang Sri, Ayon Dini Yanto, and Heris Suhendar. "Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12.2 (2021): 165-186. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Maulidina, Hikmatul. (2019). “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah” 3 (2): Hlm 1–13.
- Muhammad Aziz Sulistyowibowo. (2018), Penguatan Executive Preview Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)”. *MIMBAR YUSTITIA*, No. 2(2),): 142-158. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4(1), 120–130. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2951>
- Rasji, P. V. (2023). *Executive Preview* Dalam Sistem Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2389–2395. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5760>
- Rustam, R. (2023). Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 2093-2098. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4939>
- Syapriillah, A. (2019). Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview. *Borneo Law Review*, 3(2), 96-112. DOI: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1077>.
- Shifa Isfahani. (2021), Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Andalas Padang.

- Soegiyono. (2015). Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. <https://puskkpa.lapan.go.id>.
- Trinanda, D. (2022). “Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.” *Ijtihad* 38 (1)
- Wahab, A., & Surya, I. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum* 8(2), Hlm. 113. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>
- Widiati, E. P., & Adam, H. (2012). Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah. *Yuridika*, 27(1), 77–95. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.289>
- Yuli Asmara Triputra. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum, Vol. III*, 417–428.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.H-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

e. Lain-lain

Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122/> Diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022: Pembinaan Hukum di Daerah

Hukum Online. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/> Diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

Hukum Online. (2022). Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> diakses pada tanggal 24 Juli 2024.

Humas MKRI (2021). Saldi Isra Bahas Isu Aktual Hukum dan Konstitusi di Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17395&menu=2>
(Diakses pada 11 Januari 2024)

Laporan E-legal Drafting Kementerian Hukum dan HAM per Juli 2024.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2019). Laporan Penelitian: Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).